

## KRITIKAN IDEOLOGI JURGEN HABERMAS DAN RELEVANSINYA BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA

Fransiskus Nino<sup>1</sup>, Gabriel James Seso<sup>2</sup>, Florante Marjo Metkono<sup>3</sup>  
[ninogfransiskus@gmail.com](mailto:ninogfransiskus@gmail.com)<sup>1</sup>, [sesojames789@gmail.com](mailto:sesojames789@gmail.com)<sup>2</sup>, [marjoflorante@gmail.com](mailto:marjoflorante@gmail.com)<sup>3</sup>

IFTK Ledalero

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kritikan ideologi Jürgen Habermas terhadap struktur ruang publik dan proses demokrasi, serta relevansinya dalam membangun demokrasi di Indonesia. Habermas melalui konsep public sphere dan diskursus rasional, menekankan pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi ekonomi dan politik untuk tercapainya konsensus yang adil dan inklusif dalam masyarakat demokratis. Namun, penerapan teori ini di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan sosial, politik identitas, dan fragmentasi ruang publik, yang menghalangi terbentuknya ruang diskursus yang egaliter. Penulis juga mengkritisi keterbatasan teori Habermas dalam konteks negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi, seperti Indonesia. Pentingnya memperluas ruang publik, dengan memperhatikan keberagaman dan kesetaraan akses informasi, menjadi salah satu solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun teori Habermas menawarkan perspektif kritis yang berguna untuk memperbaiki kualitas demokrasi, penerapannya di Indonesia membutuhkan adaptasi terhadap kondisi sosial-politik yang ada, serta pemberdayaan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik secara rasional dan inklusif.

**Kata Kunci:** Ideologi Jurgen Habermas, Demokrasi Indonesia.

### ABSTACT

*This text aims to analyze Jürgen Habermas's ideological critique of the structure of the public sphere and the democratic process, as well as its relevance to building democracy in Indonesia. Through the concepts of the public sphere and rational discourse, Habermas emphasizes the importance of a public space free from economic and political domination in order to achieve fair and inclusive consensus in a democratic society. However, the application of this theory in Indonesia faces various challenges, including social inequality, identity politics, and fragmentation of the public sphere, which hinder the formation of an egalitarian discourse space. The author also critiques the limitations of Habermas's theory within the context of a country with high social and cultural diversity, such as Indonesia. Expanding the public sphere by taking into account diversity and equal access to information becomes one of the solutions that can be adopted to improve the quality of democracy in Indonesia. This article shows that although Habermas's theory offers a useful critical perspective for improving democratic quality, its implementation in Indonesia requires adaptation to existing socio-political conditions, as well as the empowerment of society to engage more actively in the political process in a rational and inclusive manner.*

**Keywords:** *Jurgen Habermas's Ideology, Indonesian Democracy.*

### PENDAHULUAN

Ideologi utama Habermas berkaitan dengan pentingnya komunikasi rasional dan deliberasi publik dalam membentuk masyarakat yang demokratis. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan yang sah dalam masyarakat, individu perlu terlibat dalam diskusi terbuka yang bebas dari dominasi dan distorsi. Habermas mengembangkan konsep ruang publik (public sphere), yaitu arena mengenai individu yang dapat berdiskusi dan berdebat secara rasional tanpa pengaruh kekuasaan atau kepentingan

ekonomi. Demokrasi di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis, menghadapi tantangan besar dalam memastikan partisipasi politik deliberatif. Dalam konteks ini, pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik dan demokrasi deliberatif menjadi relevan sebagai kerangka teoritis untuk memahami bagaimana proses demokrasi seharusnya berlangsung. Habermas menekankan pentingnya diskursus rasional yang terbuka, yakni individu dan kelompok dapat berdebat dan mencapai konsensus tanpa adanya dominasi. Namun, meskipun ide-idenya menawarkan visi demokrasi yang ideal, kritik terhadapnya muncul, baik dari segi ketidakmungkinan tercapainya ruang publik yang benar-benar bebas dan inklusif, maupun dari perspektif ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang menghambat partisipasi yang setara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi ideologi Habermas dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial dan politik yang ada, kita akan menganalisis sejauh mana gagasan tentang ruang publik dan demokrasi deliberatif dapat diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia, yang kerap kali menghadapi polarisasi dan ketimpangan dalam proses politiknya.

Secara keseluruhan, mengkritisi ideologi Habermas dalam konteks demokrasi Indonesia sangat penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dapat diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini juga membantu untuk memperbaiki kualitas demokrasi, menjaga ruang publik yang sehat, dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Teori Dan Pemikiran Jurgen Habermas**

#### **A. Biografi**

Jürgen Habermas lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Habermas belajar di Universitas Gießen dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Frankfurt, tempat ia terpengaruh oleh para pemikir dari Institut untuk Penelitian Sosial (Institut für Sozialforschung), yang dikenal dengan aliran Teori Kritis. Jürgen Habermas seorang pemikir yang terkenal dengan beberapa teori-teorinya. Di sini penulis lebih merujuk pada teori yang berkaitan dengan demokrasi. Jürgen Habermas pun adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang terkenal dengan teorinya tentang diskursus demokrasi (*deliberative democracy*). Teori demokrasi Habermas berfokus pada pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi publik dalam proses demokratis, serta bagaimana ruang publik (*public sphere*) memainkan peran kunci dalam menciptakan keputusan politik yang sah. Jürgen Habermas menerapkan konsep rasionalitasnya untuk sebuah teori masyarakat untuk menunjukkan kriteria-kriteria kritis.<sup>1</sup>

#### **B. Teori Komunikatif dan Tindakan Komunikatif**

Teori Komunikatif dan Tindakan Komunikatif adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, terutama dalam konteks pemahaman makna dalam komunikasi. Keduanya sering dikaitkan dengan pemikiran Jürgen Habermas, seorang filsuf dan sosiolog Jerman, yang banyak mengembangkan teori ini.

##### **i. Teori Komunikatif**

Teori komunikatif, atau lebih tepatnya disebut Teori Tindakan Komunikatif (Communicative Action Theory), adalah pendekatan yang mengutamakan peran komunikasi dalam pencapaian kesepakatan dan koordinasi antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam teori ini, komunikasi dianggap sebagai suatu kegiatan yang berfokus pada pencapaian konsensus, di mana orang-orang berusaha untuk saling

---

<sup>1</sup>*Ibid. hlm. 16.*

memahami dan mencapai kesepakatan dengan cara yang rasional dan tidak bersifat manipulatif. Habermas mengembangkan teori ini dengan tujuan untuk menggambarkan cara-cara manusia dapat berinteraksi secara rasional untuk mencapai kesepakatan bersama. Intinya, teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dari paksaan dan penuh dengan pengertian bersama.

ii. Tindak Komunikatif (Communicative Action)

Tindak komunikatif merujuk pada tindakan sosial yang dilakukan oleh individu ketika mereka berkomunikasi satu sama lain. Dalam tindak komunikatif, ada tujuan untuk mencapai pemahaman bersama, dan setiap pihak yang terlibat berusaha untuk berkomunikasi dengan cara yang jujur dan rasional. Tindak ini berbeda dengan tindak instrumental, di mana orang lebih fokus pada pencapaian tujuan praktis atau material tanpa memperhatikan nilai-nilai komunikasi yang mendalam.

Beberapa prinsip dasar tindak komunikatif menurut Habermas adalah:

- Partisipasi yang bebas dan setara: Setiap individu berhak berbicara dan didengarkan tanpa ada dominasi atau ketidakadilan.
- Kesepakatan rasional: Proses komunikasi bertujuan untuk mencapai konsensus berdasarkan alasan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
- Penghormatan terhadap norma sosial: Dalam komunikasi, ada norma-norma yang dihormati, seperti kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling menghargai.

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, teori komunikatif dan tindak komunikatif membantu kita memahami bagaimana komunikasi yang sehat dan terbuka dapat membangun hubungan sosial yang harmonis. Misalnya, dalam diskusi, debat, atau negosiasi, para pihak diharapkan dapat berkomunikasi secara rasional, mendengarkan, dan mencari kesepakatan yang adil tanpa adanya manipulasi atau tekanan.

### C. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif adalah sebuah konsep dalam teori politik yang menekankan pentingnya diskusi terbuka dan rasional antara warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dalam model ini, keputusan politik diambil bukan hanya berdasarkan pada pemungutan suara atau perhitungan suara mayoritas, tetapi melalui proses diskusi yang mendalam, di mana semua pihak berusaha untuk saling memahami pandangan satu sama lain, berdebat secara konstruktif, dan mencari kesepakatan yang adil. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara warga Negara untuk mencapai mufakat<sup>2</sup> dengan konsep deliberatif akan membantu warga untuk menyampaikan gagasannya untuk mencapai kesejahteraan. Beberapa ciri utama dari demokrasi deliberatif antara lain:

- i. Partisipasi Aktif: Semua warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses deliberatif, baik secara langsung melalui forum publik, atau melalui perwakilan.
- ii. Diskusi Rasional dan Terbuka: Warga negara diharapkan dapat berargumen secara rasional dan terbuka, dengan mengedepankan alasan dan bukti, bukan hanya emosi atau kepentingan pribadi.
- iii. Dialog dan Konsensus: Tujuan utama dari deliberasi bukan semata-mata untuk memenangkan argumen, tetapi untuk mencari konsensus atau titik temu yang bisa

---

<sup>2</sup>Pahrudin, *Anatomi Kebijakan Publik, Sejarah, Konsepsi, Analisis, Dan Inovasi Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 116.

diterima oleh semua pihak, meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing individu atau kelompok.

- iv. Pengakuan terhadap Keragaman: Demokrasi deliberatif mengakui adanya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara, namun menekankan pentingnya saling menghormati dan mencoba memahami perspektif orang lain. Konsep ini berakar pada pemikiran filsuf politik seperti Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan politik yang sah dan adil. Dalam prakteknya, demokrasi deliberatif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti forum publik, debat terbuka, atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Demokrasi jenis ini dianggap lebih inklusif dan dapat menghasilkan keputusan yang lebih bermartabat dan berkelanjutan karena melibatkan berbagai perspektif yang berbeda.

#### **D. Hubungan Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Neoliberalatif Jürgen Habermas**

Demokrasi deliberatif dan demokrasi neoliberalatif memiliki hubungan yang kompleks, terutama dalam pandangan Jürgen Habermas. Habermas mendukung demokrasi deliberatif sebagai model yang menekankan diskusi terbuka dan rasional untuk mencapai konsensus. Dalam demokrasi deliberatif, warga negara terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog yang inklusif. Sementara itu, demokrasi neoliberalatif lebih berfokus pada pasar bebas dan peran minimal negara dalam ekonomi, dengan penekanan pada individualisme dan efisiensi pasar. Habermas mengkritik bentuk demokrasi neoliberalatif yang sering kali mendominasi proses politik dengan kekuatan ekonomi dan korporasi, yang bisa mengurangi ruang untuk deliberasi publik yang sejati. Jadi, hubungan keduanya terletak pada kritik Habermas terhadap dominasi kepentingan ekonomi dalam sistem demokrasi neoliberalatif, yang menurutnya menghambat proses deliberasi dan merusak demokrasi yang sejati. Demokrasi neoliberalatif cenderung mengutamakan efisiensi pasar dan keputusan berbasis kompetisi, sementara demokrasi deliberatif berusaha menjaga ruang bagi perdebatan yang lebih inklusif dan reflektif.

#### **E. Ruang Publik**

Komunikasi, ruang publik, dan liberalisasi demokratis dapat di terapkan untuk menganalisis kondisi demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa pemikiran Habermas yang relevan dengan demokrasi di Indonesia, penulis lebih merujuk pada teori ruang publik yang bisa meningkatkan dan mengubah demokrasi di Indonesia pada era sekarang. Habermas mengembangkan konsep ruang publik untuk menggambarkan arena sosial di mana individu dapat berdiskusi secara bebas dan terbuka tentang masalah-masalah politik, sosial, dan budaya. Ruang publik ini bukanlah ruang fisik tertentu, melainkan ruang komunikasi yang terlepas dari kontrol negara atau ekonomi. Dalam ruang publik ini, individu memiliki kebebasan untuk berargumen dan berdebat dengan alasan yang rasional, tanpa tekanan dari kekuatan eksternal.

Habermas membedakan ruang publik dari ruang pribadi dan ruang negara. Dalam ruang publik, publik dapat berbicara secara bebas dan berpartisipasi dalam pembentukan opini publik yang berujung pada keputusan kolektif. Habermas memahami ruang publik sebagai ide dan ideologi tempat warga negara berpartisipasi secara bebas dan setara dalam proses diskusi menghasilkan kebenaran dan kebajikan bersama.<sup>3</sup> Dengan adanya ruang publik sangat menguntungkan warga negara dan sangat penting dalam demokrasi, karena memberikan berbagai keuntungan bagi warga negara. Berikut adalah beberapa keuntungan

---

<sup>3</sup>Gabriel Lele, *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 30.

utama yang dapat diperoleh oleh warga negara dengan adanya ruang publik dalam sistem demokrasi:

i. Wadah untuk Ekspresi dan Partisipasi

- Kebebasan Berekspresi. Ruang publik menyediakan tempat bagi warga negara untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan perasaan mereka secara bebas. Ini sangat penting dalam demokrasi, di mana kebebasan berbicara adalah hak dasar yang dijamin.
- Partisipasi Politik. Warga negara dapat menggunakan ruang publik untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, protes, demonstrasi, atau kegiatan lainnya yang memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam proses politik.

ii. Penguatan Keterlibatan Sosial

- Interaksi Sosial Ruang publik memungkinkan warga negara dari berbagai latar belakang untuk saling berinteraksi dan berdialog. Ini memperkuat solidaritas sosial dan membangun rasa kebersamaan di masyarakat.
- Pembentukan Identitas Sosial Warga negara dapat membentuk identitas sosial mereka melalui keterlibatan dalam ruang publik, baik melalui kegiatan budaya, sosial, atau politik.

iii. Akuntabilitas Pemerintah

- Transparansi dan Pengawasan Ruang publik menyediakan arena di mana warga negara dapat mengkritik kebijakan pemerintah, menyuarakan ketidakpuasan mereka, dan meminta pertanggungjawaban dari pejabat publik. Ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui ruang publik, warga negara diberdayakan untuk menyuarakan keinginan dan aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan.

iv. Pendidikan Demokrasi

- Pendidikan Warga Negara Ruang publik adalah tempat di mana warga negara dapat memperoleh pendidikan politik, belajar tentang hak dan kewajiban mereka, serta tentang cara-cara berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ini sangat penting untuk membangun budaya demokrasi yang kuat.
- Pembentukan Opini Publik Dalam ruang publik, opini publik terbentuk melalui diskusi dan debat, yang memungkinkan warga negara untuk memiliki pandangan yang lebih kritis dan informasional mengenai berbagai isu yang mempengaruhi mereka.

v. Meningkatkan Inklusivitas

- Penghormatan terhadap Keberagaman Ruang publik adalah tempat di mana berbagai kelompok, baik berdasarkan etnis, agama, gender, maupun orientasi politik, dapat bersuara dan berinteraksi dengan cara yang inklusif. Ini mendukung pluralisme dan toleransi dalam masyarakat demokratis.
- Akses untuk Semua Ruang publik yang terbuka memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

vi. Menjaga Keseimbangan Kekuatan

- Menjaga Keseimbangan Kekuasaan dengan adanya ruang publik yang bebas, warga negara dapat melawan dominasi pihak yang berkuasa, termasuk elit politik dan ekonomi. Ruang publik memberikan ruang bagi suara-suara minoritas yang sering kali terpinggirkan dalam struktur kekuasaan formal.
- Menjadi Sarana Penghubung antara Warga dan Negara ruang publik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara. Warga negara dapat menyampaikan masalah, keluhan, atau aspirasi mereka kepada pengambil kebijakan.

#### vii. Meningkatkan Kualitas Demokrasi

- Diskusi dan Debat yang Sehat ruang publik mendukung diskusi yang terbuka dan beragam tentang isu-isu penting, yang memperkaya kualitas keputusan politik dan sosial yang diambil oleh negara. Dengan demikian, demokrasi menjadi lebih matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Pembentukan Konsensus di ruang publik, warga negara dapat berbicara tentang perbedaan mereka dan mencoba menemukan titik temu atau konsensus tentang kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Secara keseluruhan, ruang publik berfungsi sebagai jantung kehidupan demokrasi. Tanpa ruang publik yang terbuka dan bebas, partisipasi warga dalam proses demokrasi akan sangat terbatas, dan sistem politik bisa menjadi lebih otoriter atau terpusat pada kekuasaan yang tidak terkontrol.

#### F. Konsep-Konsep Demokrasi Deliberatif

Apa itu demokrasi deliberatif. Deliberatif berasal dari kata latin *deliberatio* yang lalu dalam bahasa inggris menjadi *deliberation* istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau yang lebih tepatnya “musyawarah”. Demokrasi deliberatif adalah suatu bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya proses diskusi, pertukaran argumen, dan pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem ini, keputusan-keputusan publik tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas atau kepentingan individu, tetapi juga melibatkan dialog yang terbuka, inklusif, dan rasional antara warga negara untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan adil. Konsep ini berkembang sebagai tanggapan terhadap kekurangan model demokrasi representatif yang sering kali dianggap terlalu fokus pada keputusan yang cepat atau berbasis kepentingan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan alasan yang mendalam dan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Di dalam demokrasi deliberatif semua tipe diskursus praktis beroperasi di dalam formasi opini dan aspirasi secara demokratis untuk secara publik menguji alasan-alasan bagi peraturan politis yang diusulkan itu.<sup>4</sup> Warga negara diundang untuk berdiskusi secara terbuka dan rasional tentang isu-isu publik. Proses ini mengutamakan pertimbangan alasan dan argumen yang kuat, bukan sekadar keputusan berdasarkan emosi atau kepentingan individu. Semua suara harus didengar, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan partisipasi warga negara secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk mereka yang mungkin terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Setiap peserta dalam diskusi diharapkan dapat menyampaikan argumen secara bebas dan setara. Ini berarti menghindari dominasi kelompok tertentu atau ketimpangan dalam akses ke informasi atau platform. Demokrasi deliberatif bukan hanya tentang keputusan yang diambil pada saat tertentu, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi dialog yang berkelanjutan di antara warga negara. Proses ini memungkinkan adanya evaluasi dan revisi terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dalam deliberasi, peserta diharapkan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain, serta mencari titik temu atau kompromi. Ini berbeda dengan model demokrasi yang lebih mengutamakan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Adapun proses-proses yang terdapat dalam demokrasi deliberatif ialah antara lain:

- **Diskusi Awal:** Warga negara berbicara tentang masalah yang sedang dihadapi, saling berbagi informasi dan perspektif.

---

<sup>4</sup>F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum, Dan, Ruang Publik, Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.129.

- **Deliberasi:** Semua pihak mempertimbangkan berbagai argumen, mempertanyakan pandangan yang berbeda, dan mencoba untuk memahami berbagai sudut pandang.
- **Pengambilan Keputusan:** Berdasarkan hasil deliberasi, keputusan diambil yang mencerminkan konsensus atau, jika perlu, keputusan mayoritas yang sudah melalui proses pertimbangan mendalam.
- **Evaluasi dan Umpan Balik:** Setelah keputusan diambil, ada mekanisme untuk mengevaluasi hasilnya dan memfasilitasi dialog lanjutan jika diperlukan.

Konsep demokrasi deliberatif banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf politik, seperti **Jürgen Habermas**, yang menekankan pentingnya **ruang publik** untuk diskusi rasional dan inklusif. Habermas berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur formal untuk pemilihan umum, tetapi juga ruang untuk diskusi yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau ketimpangan ekonomi. Selain itu, **John Rawls** dengan teori "keadilan sebagai keadilan yang adil" turut memberi kontribusi pada pengembangan demokrasi deliberatif, khususnya dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh semua pihak melalui proses deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif juga memiliki keuntungan-keuntungannya: **a) Pengambilan Keputusan yang Lebih Rasional:** Proses deliberasi memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan didasari oleh alasan yang kuat, bukan sekadar reaksi emosional atau kepentingan sesaat., **b) Peningkatan Keterlibatan Warga Negara:** Warga negara tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi aktif terlibat dalam pembentukan kebijakan., **c) Penguatan Legitimasi Keputusan:** Ketika keputusan diambil melalui deliberasi yang terbuka dan inklusif, masyarakat lebih cenderung menerima dan menghormati hasil tersebut meskipun tidak semua pihak setuju., **d) Mengurangi Ketegangan Sosial:** Dengan adanya ruang untuk berdialog, berbagai kelompok masyarakat dapat saling memahami pandangan dan kekhawatiran satu sama lain, yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik sosial., **e) Pandangan Habermas tentang Konsensus (Kesepakatan).**

Dalam pandangan Habermas, konsensus bukanlah sekadar kesepakatan yang dicapai melalui pemaksaan atau kekuasaan, tetapi lebih kepada bentuk persetujuan yang muncul dari diskusi yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada alasan. Dalam *Teori Tindakan Komunikatif*, Habermas membedakan antara "tindakan komunikatif" dan "tindakan strategis." Tindakan komunikatif adalah upaya untuk mencapai pemahaman bersama melalui dialog rasional. Dengan demikian, teori tindakan komunikatif Habermas merupakan peralihan cara berpikir kerja sebagai bentuk rasionalitas intersubjektif dialog interaksi.<sup>5</sup> Dalam kerangka ini, konsensus dicapai ketika semua pihak yang terlibat dapat menyetujui suatu keputusan berdasarkan alasan yang dipahami bersama. Bagi Habermas, konsensus yang sah hanya dapat tercapai jika semua pihak yang terlibat dalam diskursus (perbincangan) memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tanpa dominasi satu pihak terhadap yang lain. Proses ini harus mengedepankan pertimbangan rasional, di mana setiap argumen dapat diterima atau ditolak berdasarkan relevansinya dan bukannya berdasarkan kekuasaan atau tekanan eksternal. Dalam konsep ini Habermas lebih menekankan interaksi komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi, di mana semua pihak dapat mengajukan argumen dan mencapai pemahaman yang saling disepakati. Hal ini menjadi landasan bagi demokrasi deliberatif, di mana keputusan-keputusan politik atau sosial tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga pada proses diskusi yang menghargai alasan dan pertimbangan rasional.

---

<sup>5</sup>Fabianus Fensi, *Komunikasi Digital, Antara Konsensus Ideologi Kolektif* (Jakarta: Jejak Pustaka 2021), hlm. 37.

## 2. Kritikan terhadap Ideologi Habermas

Kritikan utama terhadap ideologi-ideologi Habermas adalah bahwa diskursus rasional yang bebas dari dominasi dan kesalahan praktis sulit untuk tercapai dalam masyarakat yang terpecah dan terpolarisasi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Habermas terlalu idealis dalam mengharapkan bahwa masyarakat dapat mencapai konsensus rasional dalam situasi yang penuh ketegangan dan ketidaksetaraan sosial. Ada beberapa kritikan terhadap ideologi Jürgen Habermas, antara lain:

- Penyederhanaan Relasi Kekuasaan. Habermas berusaha untuk membangun suatu model komunikasi di mana semua partisipan memiliki kesempatan yang setara untuk berargumen. Namun, banyak kritik yang mengatakan bahwa teori Habermas tidak cukup memperhitungkan struktur kekuasaan yang mendalam yang ada dalam masyarakat. Michel Foucault, misalnya, berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya dilihat dalam konteks institusi formal atau negara, tetapi juga tersebar dalam hubungan sosial dan praktek sehari-hari yang membentuk cara orang berbicara dan berpikir. Dengan kata lain, Habermas dianggap terlalu optimis mengenai kemampuan individu atau kelompok untuk berkomunikasi tanpa pengaruh kekuasaan yang bias.
- Pengabaian terhadap Diferensiasi Sosial dan Identitas. Teori Habermas lebih fokus pada komunikasi rasional yang universal dan objektif, tetapi ini mengabaikan peran penting identitas sosial, kultural, dan subjektif dalam proses komunikasi. Kritik ini banyak datang dari teori-teori postmodern dan feminis yang berpendapat bahwa identitas, perbedaan, dan pengalaman subjektif sangat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Pendekatan Habermas yang terlalu menekankan rasionalitas universal cenderung mengabaikan variasi budaya dan pengalaman yang berbeda antar kelompok.
- Batasan dalam Konsep *Public Sphere*. Konsep *public sphere* (ruang publik) Habermas menggambarkan tempat di mana individu dapat berdiskusi dan berpartisipasi dalam opini publik secara bebas dari pengaruh negara atau kekuatan ekonomi. Namun, kritikus menyatakan bahwa ruang publik yang digambarkan oleh Habermas lebih bersifat ideal dan tidak mempertimbangkan ketimpangan sosial yang sebenarnya ada dalam praktik. Misalnya, ruang publik yang dibentuk melalui media massa sering kali didominasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan politik, yang menjadikan teori Habermas kurang relevan untuk masyarakat yang sangat tidak setara.
- Kurangnya Penekanan pada Emosi dan Nilai Subjektif. Habermas terlalu mengutamakan rasionalitas dalam diskursus dan mengabaikan dimensi emosional dan nilai-nilai subjektif yang juga memainkan peran besar dalam kehidupan sosial dan politik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan Habermas yang sangat rasional mengurangi ruang bagi perbedaan pandangan yang tidak dapat atau sulit untuk diperdebatkan secara rasional, seperti masalah moral, etika, dan identitas budaya.
- Kritik Feminisme beberapa pemikir feminis, seperti Nancy Fraser dan Seyla Benhabib, mengkritik pendekatan Habermas terkait konsep *public sphere*. Mereka berpendapat bahwa ruang publik yang digambarkan oleh Habermas secara historis dikecualikan dari banyak kelompok, terutama perempuan dan minoritas. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa teori Habermas tidak cukup mengakui ketidaksetaraan yang mendalam yang menghalangi partisipasi penuh dalam diskursus publik, dan ini juga menyarankan perlunya ruang publik alternatif yang lebih inklusif dan egaliter.

- Kurangnya Penekanan pada Pluralisme Nilai. Habermas mengasumsikan bahwa konsensus rasional dapat dicapai jika semua partisipan mematuhi norma diskursus tertentu. Namun, kritikus yang datang dari teori pluralisme nilai mengatakan bahwa tidak semua nilai dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan pendekatan rasional semata, karena banyak nilai-nilai yang bertentangan yang melekat pada identitas dan keyakinan sosial yang berbeda. Bagi sebagian orang, nilai-nilai seperti agama, tradisi, atau identitas kolektif mungkin tidak bisa disesuaikan dengan rasionalitas yang dimaksudkan Habermas.
- Kritik dari Teori Kritis Marxis beberapa pengkritik dari tradisi Marxis, seperti Frederic Jameson dan Slavoj Žižek, juga menantang pandangan Habermas mengenai masyarakat dan ruang publik. Mereka berpendapat bahwa teori komunikasi dan konsensus rasional Habermas mengabaikan peran besar ekonomi dalam struktur sosial dan politik. Dengan lebih memfokuskan pada diskursus rasional, Habermas mungkin mengabaikan kenyataan bahwa ketidaksetaraan kelas dan ekonomi tetap mendominasi hampir semua bidang kehidupan masyarakat.

### 3. Hubungan Dengan Demokrasi Di Indonesia

#### A. Konsep *Public Sphere* dan Demokrasi di Indonesia.

Habermas mendefinisikan *public sphere* (ruang publik) sebagai ruang di mana warga negara dapat berdiskusi secara bebas dan rasional mengenai isu-isu publik tanpa campur tangan dari kekuasaan negara atau kepentingan ekonomi besar. Dalam konteks Indonesia, *public sphere* yang ideal dalam teori Habermas bisa diterjemahkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskursus politik dan sosial yang bebas, terbuka, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, ruang publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan ketimpangan dan ketidaksetaraan. Beberapa masalah yang relevan dengan teori Habermas adalah:

- Dominasi Media dan Ketidaksetaraan Akses Informasi: Meskipun Indonesia memiliki kebebasan media, terdapat dominasi beberapa kelompok atau konglomerat dalam penguasaan media massa. Hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus yang setara. Dengan kata lain, *public sphere* Indonesia lebih sering dikuasai oleh kelompok yang memiliki akses lebih besar ke media dan sumber daya, sebuah kritik yang juga dilontarkan terhadap teori Habermas tentang kesetaraan dalam diskursus publik.
- Ruang Publik yang Terfragmentasi: Meskipun ada kebebasan berpendapat dan berbagai platform untuk berdiskusi (media sosial, forum diskusi, partai politik, dll.), ruang publik di Indonesia terfragmentasi oleh faktor-faktor seperti identitas etnis, agama, dan ideologi. Banyak kelompok, terutama yang marginal atau minoritas, sering kali tidak memiliki ruang yang setara dalam diskursus nasional. Ini juga menjadi kritik terhadap pandangan Habermas yang menganggap ruang publik dapat berfungsi sebagai arena bagi diskursus yang egaliter.

#### B. Diskursus Rasional dalam Konteks Demokrasi Indonesia.

Habermas menganggap bahwa dalam demokrasi, diskursus rasional adalah jalan menuju konsensus yang bisa diterima oleh semua pihak. Diskursus ini seharusnya bebas dari manipulasi dan dominasi, dan berdasarkan argumen yang obyektif. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa poin yang relevan:

- Tantangan Politisasi Diskursus: Di Indonesia, banyak diskursus politik dan sosial sering kali dikendalikan oleh narasi-narasi populis yang tidak selalu mengutamakan rasionalitas. Isu-isu seperti politik identitas, agama, dan nasionalisme sering kali dipolitikasi untuk memperoleh keuntungan elektoral, yang membuat diskursus rasional sulit terwujud dalam banyak kasus.

- **Polarisasi Politik dan Ketidakrasionalan Diskursus:** Dalam praktik politik Indonesia, terutama dalam pemilu dan proses legislatif, sering kali terlihat polarisasi yang tajam antara kelompok-kelompok politik atau ideologi. Hal ini menyulitkan tercapainya konsensus berdasarkan argumen rasional, sebuah prinsip dasar dalam teori Habermas. Misalnya, dalam diskusi mengenai isu-isu besar seperti kebijakan ekonomi atau reformasi hukum, seringkali pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak dapat terlibat dalam dialog yang produktif dan rasional, melainkan terjebak dalam perdebatan yang lebih bersifat emosional dan ideologis.

### **C. Ketimpangan Sosial dan Keterlibatan Politik.**

Menurut teori Habermas, partisipasi dalam ruang publik haruslah bersifat inklusif dan setara. Namun, dalam praktik demokrasi Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali membatasi keterlibatan politik masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat.

- **Akses Pendidikan dan Kesadaran Politik:** Pendidikan dan pemahaman politik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, belum sepenuhnya terlibat dalam proses demokrasi karena keterbatasan akses terhadap informasi yang berkualitas dan pendidikan politik yang memadai. Dengan demikian, partisipasi mereka dalam ruang publik yang rasional dan kritis sangat terbatas.
- **Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial:** Dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, politik identitas (terkait etnis, agama atau budaya) memainkan peran penting dalam dinamika politik. Ketika politik identitas menjadi dominan, ini dapat mengurangi kualitas diskursus publik dan merusak potensi terwujudnya ruang publik yang berdasarkan rasionalitas dan konsensus, seperti yang dicita-citakan oleh Habermas. Politik identitas sering kali menciptakan polarisasi dan mengurangi ruang untuk dialog rasional yang dapat menguntungkan seluruh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dalam ruang publik ini, diskusi yang rasional dan terbuka memungkinkan tercapainya konsensus sosial yang adil. Habermas juga mengkritik ideologi-ideologi yang mengarah pada dominasi, seperti kapitalisme dan otoritarianisme, yang menurutnya merusak komunikasi yang bebas dan jujur. Ia menekankan pentingnya aksi komunikasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan kesetaraan, serta menolak penggunaan kekuasaan untuk mendistorsi proses komunikasi tersebut. Secara keseluruhan, ideologi Habermas berfokus pada membangun demokrasi yang deliberatif — yakni keputusan politik dan sosial diambil melalui diskusi rasional, terbuka, dan inklusif antara warga negara yang setara.

Penulis menyimpulkan keseluruhan dari paper ini berdasarkan pemikiran Jürgen Habermas. Jürgen Habermas mau menekankan di dalam dunia demokrasi harus yang menjadi dasarnya ialah rasional atau yang menjadi tolak ukur untuk mencapai segala hal yang diinginkan oleh warga Negara, dengan menyuarakan itu semua melalui media sosial untuk menyampaikan aspirasi yang bersifat membangun sebuah Negara yang harmonis terlebih khusus di Indonesia. Jürgen Habermas juga ingin agar setiap aspirasi atau masukan kaum marginal harus menjadi perhatian dalam takaran yang sama dengan yang lain. Untuk itu diperlukan ruang publik yang terbuka, yang terdapat respect terhadap satu sama lain. Dengan begitu, ideologi Habermas maupun kritikan yang dilontarkan dapat menjadi perpaduan yang inklusif dalam pencapaian demokrasi di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fensi, Fabianus. Komunikasi Digital, Antara Konsensus Ideologi Kolektif. Jakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Hardiman, F Budi. Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum, Dan, Ruang Publik, Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Lele, Gabriel. Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Madung, Otto Gusti Ndegong. Jurgen Habermas dan John Rawls. Maumere: Ledalero, 2018.
- Pahrudin. Anatomi Kebijakan Publik, Sejarah, Konsepsi, Analisis, Dan Inovasi Kebijakan. Jakarta: Kencana, 2023.